



Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan PTN BH dalam Perspektif *Good University Governance*

(Tinjauan Literatur)

I Dewa Ayu Yuni Wulandari¹, Gede Adi Yuniarta², Ni Luh Gede Erni
Sulindawati³

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha¹⁻³

Email Korespondensi: ayu.yuni@student.undiksha.ac.id, adi.yuniarta@undiksha.ac.id,
erni.sulindawati@undiksha.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 06 Juli 2026

ABSTRACT

State Universities with Legal Entity Status (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum or PTN-BH) possess broad autonomy in managing finances, assets, and institutional resources, thereby requiring the implementation of sound governance through the principles of transparency and accountability. This study aims to examine and synthesize the implementation of financial transparency and accountability in PTN-BH from the perspective of Good University Governance (GUG). This study employed a literature review approach by analyzing 11 scientific articles published between 2021 and 2025, sourced from Google Scholar, SINTA, and accredited national journal databases. Data were analyzed using a thematic synthesis technique to identify patterns, similarities, and differences among previous studies. The findings indicate that transparency in PTN-BH has evolved through financial reporting, digitalization of financial management systems, and the strengthening of organizational culture, although limitations in information accessibility and policy openness remain. Accountability is implemented through internal control mechanisms, auditing systems, performance evaluation, and technology-based reporting systems. However, challenges persist, including inadequate follow-up on audit findings, disparities in institutional capacity, and the potential commercialization of higher education. Strengthening transparency and accountability in an integrated manner is therefore essential to achieving effective, adaptive, and sustainable Good University Governance.

Keywords: *accountability, financial transparency, Good University Governance, PTN-BH, university governance.*

ABSTRAK

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) memiliki otonomi yang luas dalam pengelolaan keuangan, aset, dan sumber daya institusi, sehingga menuntut penerapan tata kelola yang baik melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan mensintesis implementasi transparansi dan akuntabilitas keuangan PTN-BH dalam perspektif Good University Governance (GUG). Penelitian menggunakan metode literature review dengan menelaah 11 artikel ilmiah yang dipublikasikan pada periode 2021–2025 dan diperoleh dari Google Scholar, SINTA, serta portal jurnal nasional terakreditasi. Analisis dilakukan menggunakan teknik thematic synthesis untuk mengidentifikasi pola, persamaan, dan perbedaan temuan penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa transparansi pada PTN-BH telah berkembang melalui publikasi laporan keuangan,

digitalisasi sistem pengelolaan keuangan, dan penguatan budaya organisasi, meskipun masih ditemukan keterbatasan akses informasi dan keterbukaan kebijakan. Akuntabilitas diwujudkan melalui penguatan pengendalian internal, mekanisme audit, evaluasi kinerja, dan sistem pelaporan berbasis teknologi informasi. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa lemahnya tindak lanjut hasil audit, kesenjangan kapasitas antarperguruan tinggi, dan potensi komersialisasi pendidikan. Oleh karena itu, penguatan transparansi dan akuntabilitas secara terintegrasi menjadi kunci dalam mewujudkan Good University Governance yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kata kunci: akuntabilitas keuangan, Good University Governance, PTN-BH, tata kelola perguruan tinggi, transparansi keuangan.

PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) merupakan bentuk otonomi kelembagaan tertinggi yang diberikan negara kepada perguruan tinggi negeri di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sebagai entitas badan hukum, PTN-BH memiliki kewenangan penuh untuk mengelola keuangan, aset, sumber daya manusia, dan kegiatan akademik secara mandiri tanpa harus bergantung sepenuhnya pada mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ketat. Transformasi ini merupakan kelanjutan dari reformasi kelembagaan perguruan tinggi yang telah berlangsung sejak era PT-BHMN (Badan Hukum Milik Negara) hingga pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN-BH. Dengan otonomi yang lebih luas, PTN-BH diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat penelitian, dan membangun kerja sama eksternal secara lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan zaman (Yanuar dkk., 2024; Rosyida dkk., 2025). Namun, perluasan otonomi yang dimiliki PTN-BH juga membawa konsekuensi yang tidak ringan, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan. Diversifikasi sumber pendanaan yang mencakup dana APBN, Uang Kuliah Tunggal (UKT), Iuran Pengembangan Institusi (IPI), dana abadi, hasil kerja sama tridharma, unit usaha, serta optimalisasi aset mengharuskan PTN-BH untuk memiliki sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan terukur (Wicaksono & Idris, 2025; Islami dkk., 2025).

Tanpa tata kelola yang kuat, otonomi yang diberikan berpotensi memunculkan permasalahan baru, di antaranya adalah kecenderungan komersialisasi pendidikan yang berdampak pada peningkatan beban biaya mahasiswa, melemahnya pengawasan publik, serta ketimpangan akses terhadap pendidikan tinggi berkualitas (Yanuar dkk., 2024). Dalam konteks inilah, prinsip *Good University Governance* (GUG) menjadi relevan dan mendesak untuk diterapkan. GUG merupakan kerangka tata kelola perguruan tinggi yang baik, yang dibangun di atas prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diperlukan untuk menciptakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Salah satu prinsip utama dalam GUG adalah transparansi. Transparansi menjamin hak dan kebebasan setiap individu untuk memperoleh informasi terkait

kebijakan, proses perumusan dan pelaksanaannya, serta hasil yang telah dicapai (Wulandari & Dewi, 2024). Selain itu, transparansi berperan sebagai fondasi dalam membangun kepercayaan publik karena memungkinkan pengelolaan keuangan organisasi dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (Ariani & Sulindawati, 2025). Menurut Purnamawati dan Saerce (2024), transparansi juga diterapkan untuk memungkinkan pihak eksternal berperan dalam pengawasan secara tidak langsung dan memfasilitasi akses terhadap informasi sebagai faktor utama dalam terciptanya transparansi. Dalam konteks pendidikan, transparansi dipandang sebagai bentuk keterbukaan yang memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui proses pelaksanaan kegiatan, hasil yang dicapai, serta dasar penetapan keputusan dan kebijakan yang diambil (Artini dkk., 2024). Sebaliknya, apabila transparansi tidak diterapkan dengan baik, berbagai dampak negatif dapat muncul, termasuk meningkatnya risiko terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Sudartini & Werastuti, 2025). Oleh karena itu, transparansi dalam GUG menekankan kewajiban perguruan tinggi untuk menyediakan informasi yang akurat, terbuka, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, hingga masyarakat luas.

Selain transparansi, akuntabilitas juga menjadi prinsip yang tidak dapat dipisahkan dalam penerapan GUG. Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban terbuka yang dilakukan oleh organisasi atau pihak terkait kepada pihak yang berhak menerima pertanggungjawaban (Purnamawati & Rahayu, 2025). Akuntabilitas juga dipahami sebagai sistem pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak pelaksana untuk melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan kepada pihak yang berwenang (Sujatnika & Sulindawati, 2022). Menurut Asih dan Adiputra (2022), akuntabilitas merupakan kewajiban organisasi untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam menjalankan misi organisasi demi mencapai hasil yang telah ditetapkan, yang kemudian disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban secara berkala. Untuk mendukung hal tersebut, sistem akuntabilitas memungkinkan organisasi mengukur, melaporkan, dan mengevaluasi pencapaian kinerjanya secara transparan dan terstruktur (Irianti dkk., 2026). Lebih lanjut, akuntabilitas dipandang sebagai bentuk tanggung jawab untuk memberikan penjelasan atas setiap tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi (Suwardhiti dkk., 2024). Dengan demikian, akuntabilitas menuntut agar setiap kebijakan, penggunaan sumber daya, dan hasil kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis dan terukur kepada seluruh pihak yang berkepentingan (Azis, 2021; Tamara & Supriyanto, 2022).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi transparansi dan akuntabilitas keuangan pada PTN-BH masih menghadapi tantangan yang kompleks. Endawansa dan Juwono (2024) menemukan bahwa penerapan GUG di Universitas Indonesia sebagai salah satu PTN-BH tertua belum berjalan secara optimal, khususnya pada aspek integritas keuangan, keterbukaan informasi, dan partisipasi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Temuan serupa dikemukakan oleh Hasibuan dkk. (2025) yang menganalisis 23 PTN-BH di Indonesia, di mana data audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap 169

temuan permasalahan, termasuk 86 kasus ketidakpatuhan senilai Rp43,34 miliar, namun hanya sebagian kecil yang telah ditindaklanjuti secara memadai. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang cukup serius antara mekanisme pengawasan yang telah terbentuk secara struktural dengan implementasi akuntabilitas yang sesungguhnya.

Di sisi lain, sejumlah PTN-BH telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan melalui berbagai inovasi. Wicaksono dan Idris (2025) mencatat bahwa Universitas Negeri Malang dan Universitas Airlangga telah mengembangkan sistem keuangan terintegrasi dengan standardisasi kode rekening dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang melibatkan berbagai unit kerja. Widayat dkk. (2024) juga menemukan bahwa Universitas Negeri Semarang (UNNES) mengembangkan *platform* digital MyUNNES-Kuangan untuk mengintegrasikan data perencanaan, aset, pengadaan, dan akuntansi secara *real-time*. Meskipun demikian, efektivitas pemanfaatan sistem tersebut masih berada pada kategori sedang, yang menunjukkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya mampu menjamin terwujudnya transparansi dan akuntabilitas yang optimal.

Dari perspektif regulasi, belum adanya standar akuntansi keuangan yang secara khusus mengatur PTN-BH juga menjadi salah satu hambatan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang seragam dan transparan. Tamara dan Supriyanto (2022) menegaskan bahwa PTN-BH hingga saat ini masih merujuk pada PSAK 45 (Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba) sebagai acuan paling relevan, meskipun standar tersebut tidak dibuat secara khusus untuk karakteristik dan kompleksitas pengelolaan keuangan PTN-BH. Sementara itu, analisis laporan keuangan UNNES yang dilakukan oleh Nurchayati dkk. (2025) menunjukkan bahwa transformasi menjadi PTN-BH membawa peningkatan pendapatan dan efisiensi belanja, namun juga diikuti penurunan likuiditas dan peningkatan kewajiban yang mengindikasikan bertambahnya risiko keuangan yang perlu dikelola secara akuntabel.

Kompleksitas permasalahan yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa isu transparansi dan akuntabilitas keuangan PTN-BH merupakan persoalan multidimensi yang belum terdokumentasi secara komprehensif dalam satu kajian yang terintegrasi. Sebagian besar penelitian yang ada masih berfokus pada aspek tertentu secara parsial, seperti analisis kinerja keuangan, evaluasi sistem informasi, atau kajian kebijakan, tanpa memberikan sintesis menyeluruh yang menghubungkan berbagai temuan tersebut dalam kerangka GUG yang koheren. Oleh karena itu, diperlukan suatu tinjauan literatur yang mampu mengintegrasikan berbagai perspektif tersebut untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana transparansi dan akuntabilitas keuangan diimplementasikan pada PTN-BH, serta tantangan apa saja yang masih dihadapi dalam mewujudkan *Good University Governance* yang efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan mensintesis berbagai literatur ilmiah yang relevan mengenai implementasi transparansi dan akuntabilitas keuangan pada PTN-BH dalam perspektif *Good University Governance*. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis

maupun praktis bagi pengembangan tata kelola perguruan tinggi di Indonesia, serta menjadi rujukan bagi para akademisi, praktisi, dan pemangku kebijakan dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan PTN-BH yang bertanggung jawab, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur (*literature review*) untuk mengkaji dan mensintesis berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dalam perspektif *Good University Governance* (GUG). Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar, SINTA (*Science and Technology Index*), dan portal jurnal nasional terakreditasi dengan menggunakan kata kunci PTN-BH, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, transparansi keuangan, akuntabilitas keuangan, *Good University Governance*, tata kelola perguruan tinggi, pengelolaan keuangan PTN-BH, dan *financial management higher education Indonesia*. Artikel yang dipilih dibatasi pada publikasi tahun 2021–2025 yang membahas secara langsung pengelolaan keuangan, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola PTN-BH di Indonesia. Proses seleksi dilakukan melalui penyaringan judul dan abstrak, kemudian dilanjutkan dengan penelaahan teks lengkap berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Sebanyak 11 artikel terpilih sebagai sumber data utama penelitian. Analisis data menggunakan teknik *thematic synthesis* dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan implementasi transparansi, mekanisme akuntabilitas, serta tantangan dan faktor pendukung terwujudnya *Good University Governance*. Selanjutnya, temuan dari setiap artikel dibandingkan untuk mengidentifikasi pola, persamaan, dan perbedaan, kemudian disintesis ke dalam narasi yang komprehensif guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai transparansi dan akuntabilitas keuangan PTN-BH di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Utama Artikel

Tabel 1. Temuan Utama Artikel

| No. | Nama Penulis | Judul | Temuan |
|-----|--------------------------|--|--|
| 1 | Hasibuan dkk. (2025) | <i>What Drives Financial Management in Indonesian State Universities with Legal Entity Status (PTN-BH)? Evidence from Internal Oversight Units</i> | Kinerja manajemen keuangan PTN-BH dipengaruhi oleh pengendalian internal, kualitas audit, perencanaan strategis, dan terutama budaya etika organisasi. Budaya etika menjadi faktor paling dominan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. |
| 2 | Wicaksono & Idris (2025) | <i>Financial and Asset Management of Higher Education (A</i> | Pengelolaan keuangan dan aset di PTN-BH telah berjalan sistematis melalui diversifikasi |

| No. | Nama Penulis | Judul | Temuan |
|-----|---------------------------|--|--|
| | | <i>Comparative Study of Universities with Legal Entities-PTNBH)</i> | pendanaan, digitalisasi sistem keuangan, dan optimalisasi aset sebagai sumber pendapatan alternatif. |
| 3 | Nurchayati dkk. (2025) | <i>Analisis Laporan Keuangan Universitas Negeri Semarang Sebelum dan Sesudah Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum</i> | Perubahan status menjadi PTN-BH meningkatkan pendapatan dan efisiensi belanja, tetapi juga meningkatkan risiko keuangan yang ditandai dengan penurunan likuiditas dan kenaikan kewajiban. |
| 4 | Islami dkk. (2025) | <i>Financial Sustainability of State Universities with Legal Entity (PTN-BH): Challenges and Strategies for Financial Independence</i> | PTN-BH menghadapi tantangan pemotongan anggaran dan regulasi fiskal, sehingga perlu menerapkan strategi diversifikasi pendapatan, kemitraan, dan pengembangan unit usaha untuk mencapai kemandirian finansial. |
| 5 | Endawansa & Juwono (2024) | <i>Analysis of the Principles of Good University Governance at the University of Indonesia as a State University with Legal Entity (PTN-BH) in 2014-2019</i> | Penerapan <i>Good University Governance</i> di Universitas Indonesia belum optimal, terutama pada aspek transparansi, integritas keuangan, pengelolaan SDM, dan partisipasi pemangku kepentingan. |
| 6 | Yanuar dkk. (2024) | <i>Dinamika Kebijakan Kampus PTN-BH Dari Masa ke Masa Melalui Tinjauan Historis</i> | Kebijakan PTN-BH mendorong otonomi perguruan tinggi, tetapi juga berpotensi meningkatkan komersialisasi pendidikan melalui kenaikan UKT, IPI, dan aktivitas bisnis kampus. |
| 7 | Setyorini dkk. (2022) | <i>Kesiapan Pengelolaan Aset UNY dalam Rangka Optimalisasi Income Generating untuk Mendukung PTNBH UNY</i> | UNY telah memulai persiapan menuju PTN-BH, namun masih menghadapi kendala pada tata kelola dan transfer aset. Optimalisasi aset belum maksimal meski akuntabilitas keuangan sudah baik. |
| 8 | Azis (2021) | <i>Transformasi Universitas Brawijaya dari Perguruan Tinggi</i> | Universitas Brawijaya mengembangkan strategi transisi melalui penguatan |

| No. | Nama Penulis | Judul | Temuan |
|-----|----------------------------|--|--|
| | | <i>Negeri Badan Layanan Umum Menuju Badan Hukum: Strategi pada Masa Transisi dalam Aspek Keuangan</i> | sistem keuangan, evaluasi kinerja, dana abadi, dan pengembangan unit bisnis untuk mendukung kemandirian finansial. |
| 9 | Tamara & Supriyanto (2022) | <i>Penerapan Standar Akuntansi Keuangan untuk Pengelolaan Keuangan di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)</i> | Belum terdapat standar akuntansi khusus PTN-BH. PSAK 45 dinilai paling sesuai karena mendukung karakteristik PTN-BH sebagai entitas nirlaba dan meningkatkan transparansi pelaporan keuangan. |
| 10 | Widayat dkk. (2024) | <i>Efektivitas Pemanfaatan MyUNNES-Kuangan Konten Aset dalam Pengelolaan Aset PTNBH</i> | UNNES mengembangkan sistem digital pengelolaan aset, tetapi efektivitas dalam penggunaannya dinilai masih tergolong sedang, sehingga memerlukan adanya penguatan pelatihan dan pengembangan sistem. |
| 11 | Rosyida dkk. (2025) | <i>Analisis Tantangan dan Peluang Kebijakan PTN-BH: Studi Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia</i> | PTN-BH meningkatkan kemandirian pendanaan, kualitas pendidikan, dan kolaborasi eksternal, namun masih menghadapi tantangan berupa pengurangan subsidi, potensi kenaikan UKT, dan tuntutan daya saing global. |

Berdasarkan hasil telaah terhadap 11 artikel, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa transformasi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemandirian pengelolaan keuangan dan diversifikasi sumber pendanaan. PTN-BH tidak lagi hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga mengembangkan berbagai sumber pendapatan melalui dana abadi, kerja sama tridharma, unit usaha, optimalisasi aset, dan kemitraan dengan industri (Wicaksono & Idris, 2025; Islami dkk., 2025; Rosyida dkk., 2025). Selain itu, beberapa perguruan tinggi telah melakukan penguatan sistem keuangan melalui pengembangan arsitektur keuangan, evaluasi kinerja, dan pengelolaan dana abadi untuk mendukung keberlanjutan institusi (Azis, 2021). Namun, implementasi otonomi tersebut juga diikuti oleh peningkatan kompleksitas pengelolaan keuangan dan risiko kelembagaan yang semakin besar.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan aset menjadi salah satu strategi utama dalam mendukung kemandirian PTN-BH. Berbagai perguruan tinggi mulai memanfaatkan aset non-akademik sebagai sumber pendapatan melalui penyewaan fasilitas, pengembangan unit usaha, serta digitalisasi pengelolaan aset dan keuangan (Wicaksono & Idris, 2025; Widayat dkk., 2024). Meskipun demikian, beberapa institusi masih menghadapi kendala berupa belum optimalnya transfer aset, lemahnya koordinasi antarlembaga, status kepemilikan aset yang belum jelas, serta efektivitas sistem informasi yang masih berada pada kategori sedang (Setyorini dkk., 2022; Azis, 2021). Selain itu, belum adanya standar akuntansi yang secara khusus mengatur PTN-BH juga menjadi tantangan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang seragam, sehingga PSAK 45 direkomendasikan sebagai acuan yang paling sesuai bagi karakteristik PTN-BH sebagai entitas nirlaba (Tamara & Supriyanto, 2022).

Di sisi lain, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Good University Governance* (GUG) pada PTN-BH belum sepenuhnya optimal. Faktor budaya etika organisasi, kualitas audit internal, dan komitmen pimpinan terbukti berperan penting dalam meningkatkan kinerja manajemen keuangan (Hasibuan dkk., 2025). Namun, sejumlah tantangan masih ditemukan, seperti dominasi pendapatan dari biaya pendidikan, lemahnya tindak lanjut hasil audit, keterbatasan partisipasi pemangku kepentingan, rendahnya transparansi dalam penetapan kebijakan, serta kecenderungan komersialisasi pendidikan yang berpotensi meningkatkan beban mahasiswa melalui kenaikan UKT (Endawansa & Juwono, 2024; Yanuar dkk., 2024). Secara keseluruhan, temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PTN-BH tidak hanya ditentukan oleh pemberian otonomi, tetapi juga oleh kemampuan perguruan tinggi dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola kelembagaan secara berkelanjutan.

Konsep Transparansi dalam Good University Governance

Tabel 2. Analisis Konsep Transparansi dalam Good University Governance

| No | Nama Penulis | Transparansi dalam GUG |
|----|--------------------------|--|
| 1 | Hasibuan dkk. (2025) | Transparansi diposisikan sebagai bagian dari budaya etika organisasi yang menjadi faktor paling dominan dalam meningkatkan kinerja manajemen keuangan PTN-BH dan perlu diperkuat oleh komitmen pimpinan. |
| 2 | Wicaksono & Idris (2025) | Transparansi diwujudkan melalui digitalisasi pengelolaan keuangan, standardisasi kode rekening (<i>chart of account</i>), dan keterbukaan dalam penyusunan RKAT. |
| 3 | Nurchayati dkk. (2025) | Transparansi tercermin dari penyajian laporan keuangan yang memungkinkan evaluasi kinerja keuangan sebelum dan sesudah transformasi menjadi PTN-BH. |
| 4 | Islami dkk. (2025) | Transparansi diperlukan dalam pengelolaan sumber pendapatan non-negara dan tata kelola berbasis risiko untuk mendukung keberlanjutan finansial PTN-BH. |

| No | Nama Penulis | Transparansi dalam GUG |
|----|----------------------------|--|
| 5 | Endawansa & Juwono (2024) | Transparansi belum optimal karena masih ditemukan keterbatasan akses informasi, pembaruan informasi yang tidak konsisten, dan kurangnya keterbukaan dalam proses kelembagaan. |
| 6 | Yanuar dkk. (2024) | Transparansi kebijakan PTN-BH masih rendah karena proses penetapan UKT dan kebijakan komersialisasi pendidikan belum sepenuhnya disampaikan secara terbuka kepada publik. |
| 7 | Setyorini dkk. (2022) | Transparansi diwujudkan melalui sosialisasi kepada sivitas akademika dan keterbukaan dalam pengelolaan aset, meskipun dokumentasi dan audit aset belum optimal. |
| 8 | Azis (2021) | Transparansi menjadi salah satu prinsip utama dalam model tata kelola keuangan PTN-BH melalui penerapan prinsip TARIF (<i>Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness</i>). |
| 9 | Tamara & Supriyanto (2022) | Transparansi didukung oleh penerapan standar akuntansi yang memungkinkan penyajian laporan keuangan yang relevan, andal, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. |
| 10 | Widayat dkk. (2024) | Transparansi didukung oleh sistem informasi digital yang mengintegrasikan data aset secara <i>real-time</i> , meskipun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. |
| 11 | Rosyida dkk. (2025) | Transparansi diperlukan dalam pengelolaan keuangan, penetapan UKT, penggunaan dana kerja sama, dan pelaporan kinerja agar otonomi PTN-BH tetap menjaga kepercayaan publik. |

Prinsip transparansi dalam *Good University Governance* (GUG) menekankan pentingnya keterbukaan informasi, kejelasan proses pengambilan keputusan, serta kemudahan akses informasi bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik pemerintah, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun masyarakat luas. Berdasarkan hasil sintesis sebelas artikel, transparansi pada PTN-BH tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif dalam menyampaikan laporan keuangan, tetapi juga sebagai suatu sistem tata kelola yang terintegrasi dan didukung oleh budaya organisasi yang kuat. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi transparansi pada PTN-BH dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu transparansi regulatif-formal, transparansi prosedural-sistemik, dan transparansi kultural.

Pada dimensi transparansi regulatif-formal, sebagian besar PTN-BH telah memiliki mekanisme keterbukaan informasi yang terlembagakan melalui penyusunan dan publikasi laporan keuangan, pelaporan kinerja, serta penyampaian pertanggungjawaban kepada Majelis Wali Amanat (MWA) dan pemerintah.

Nurchayati dkk. (2025) menunjukkan bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi perubahan kinerja keuangan sebelum dan sesudah transformasi menjadi PTN-BH, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih objektif. Temuan ini diperkuat oleh Tamara dan Supriyanto (2022) yang menegaskan bahwa penerapan standar akuntansi yang tepat, khususnya PSAK 45, memungkinkan informasi keuangan disajikan secara relevan, andal, dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, PTN-BH memiliki kewajiban menyampaikan laporan penggunaan anggaran, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang telah diaudit sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Dengan demikian, transparansi pada level formal telah menjadi instrumen penting dalam menjaga legitimasi institusi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan perguruan tinggi.

Pada dimensi transparansi prosedural-sistemik, transparansi diwujudkan melalui standardisasi sistem keuangan, digitalisasi proses bisnis, dan integrasi data keuangan serta aset. Wicaksono dan Idris (2025) menemukan bahwa pengelolaan keuangan PTN-BH telah didukung oleh penggunaan *chart of account* yang terstandarisasi, aplikasi keuangan terintegrasi, serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang melibatkan berbagai unit kerja. Temuan ini sejalan dengan penelitian Widayat dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa sistem MyUNNES-Kuangan dikembangkan untuk mengintegrasikan data perencanaan, keuangan, aset, pengadaan, dan akuntansi ke dalam satu platform digital. Meskipun demikian, efektivitas pemanfaatan sistem tersebut masih berada pada kategori sedang, sehingga transparansi digital belum sepenuhnya tercapai. Di sisi lain, Setyorini dkk. (2022) menemukan bahwa proses transparansi pengelolaan aset masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum optimalnya dokumentasi aset, belum adanya audit khusus terhadap aset yang berpotensi menghasilkan pendapatan, dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi prosedural belum merata di seluruh PTN-BH dan masih membutuhkan penguatan sistem informasi yang terintegrasi.

Dimensi ketiga, yaitu transparansi kultural, menunjukkan bahwa transparansi tidak cukup hanya dibangun melalui regulasi dan sistem, tetapi juga harus menjadi nilai yang melekat dalam budaya organisasi. Hasibuan dkk. (2025) menemukan bahwa budaya etika kelembagaan yang mencakup integritas, transparansi, dan profesionalisme merupakan faktor yang paling dominan dalam meningkatkan kinerja manajemen keuangan PTN-BH. Bahkan, komitmen pimpinan terbukti memperkuat pengaruh budaya etika terhadap kualitas pengelolaan keuangan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa transparansi merupakan hasil dari proses internalisasi nilai-nilai organisasi yang didukung oleh kepemimpinan yang kuat. Namun, implementasi transparansi substantif masih menghadapi berbagai tantangan. Endawansa dan Juwono (2024) menemukan bahwa pembaruan informasi pada situs resmi perguruan tinggi belum dilakukan secara konsisten dan belum terdapat keterbukaan yang memadai dalam proses seleksi jabatan struktural. Selain itu, Yanuar dkk. (2024) mengungkap bahwa kebijakan PTN-BH, khususnya terkait penetapan UKT dan komersialisasi pendidikan, belum sepenuhnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan

persepsi negatif terhadap otonomi perguruan tinggi. Temuan serupa juga disampaikan oleh Rosyida dkk. (2025) yang menegaskan bahwa keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, penggunaan dana hasil kerja sama, dan pelaporan kinerja menjadi prasyarat penting agar otonomi PTN-BH tidak menimbulkan konflik kepentingan dan penurunan kepercayaan publik.

Secara keseluruhan, sintesis literatur menunjukkan bahwa transparansi pada PTN-BH telah berkembang dari sekadar kewajiban administratif menuju tata kelola yang lebih komprehensif. Namun, implementasinya masih cenderung kuat pada aspek kepatuhan formal dan belum sepenuhnya mencapai keterbukaan substantif yang konsisten di seluruh institusi. Dengan demikian, keberhasilan penerapan transparansi dalam perspektif *Good University Governance* tidak hanya ditentukan oleh status otonomi PTN-BH, tetapi juga oleh kemampuan perguruan tinggi dalam mengintegrasikan regulasi, sistem digital, budaya organisasi, dan kepemimpinan yang berorientasi pada keterbukaan informasi. Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi harus diposisikan sebagai fondasi utama dalam membangun tata kelola perguruan tinggi yang kredibel, adaptif, dan berkelanjutan.

Konsep Akuntabilitas dalam *Good University Governance*

Tabel 3. Analisis Konsep Akuntabilitas dalam *Good University Governance*

| No. | Nama Penulis | Sintesis Ringkas Akuntabilitas dalam GUG |
|-----|---------------------------|---|
| 1 | Hasibuan dkk. (2025) | Akuntabilitas keuangan dipengaruhi oleh efektivitas pengendalian internal, kualitas audit, dan budaya etika organisasi. Temuan audit perlu ditindaklanjuti agar mekanisme pengawasan tidak berhenti pada tahap evaluasi saja. |
| 2 | Wicaksono & Idris (2025) | Akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan RKAT, validasi anggaran, standardisasi sistem keuangan, serta pengelolaan aset yang terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan. |
| 3 | Nurchayati dkk. (2025) | Akuntabilitas keuangan tercermin melalui pengukuran rasio keuangan yang memungkinkan evaluasi objektif terhadap kinerja, efisiensi, dan keberlanjutan pengelolaan keuangan PTN-BH. |
| 4 | Islami dkk. (2025) | Akuntabilitas diperlukan untuk memastikan penggunaan sumber pendanaan dan strategi kemandirian finansial dapat dipertanggungjawabkan secara berkelanjutan. |
| 5 | Endawansa & Juwono (2024) | Akuntabilitas belum optimal karena masih terdapat kelemahan pada integritas keuangan, evaluasi kinerja, pengelolaan SDM, dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola. |
| 6 | Yanuar dkk. (2024) | Akuntabilitas publik masih lemah karena peningkatan UKT dan komersialisasi pendidikan belum diikuti |

| No. | Nama Penulis | Sintesis Ringkas Akuntabilitas dalam GUG |
|-----|----------------------------|--|
| | | mekanisme pertanggungjawaban yang memadai kepada masyarakat. |
| 7 | Setyorini dkk. (2022) | Akuntabilitas ditunjukkan melalui capaian SAKIP dan opini WTP, namun belum optimal karena tindak lanjut temuan BPK dan audit aset masih terbatas. |
| 8 | Azis (2021) | Akuntabilitas dibangun melalui pengembangan arsitektur keuangan, sistem evaluasi kinerja, mekanisme audit, dan penerapan prinsip TARIF dalam masa transisi menuju PTN-BH. |
| 9 | Tamara & Supriyanto (2022) | Akuntabilitas didukung oleh penerapan standar akuntansi dan kewajiban pelaporan berkala kepada Majelis Wali Amanat, Kementerian, dan pihak terkait. |
| 10 | Widayat dkk. (2024) | Akuntabilitas pengelolaan aset didukung oleh sistem informasi digital yang terintegrasi, karena kesalahan data aset dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan institusi. |
| 11 | Rosyida dkk. (2025) | Akuntabilitas menuntut PTN-BH untuk dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, mutu pendidikan, hasil riset, dan efektivitas kerja sama kepada pemerintah dan masyarakat. |

Prinsip akuntabilitas dalam *Good University Governance* (GUG) menekankan bahwa setiap kebijakan, penggunaan sumber daya, dan hasil kinerja perguruan tinggi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik pemerintah, Majelis Wali Amanat (MWA), sivitas akademika, mahasiswa, maupun masyarakat luas. Berdasarkan sintesis sebelas artikel, implementasi akuntabilitas pada PTN-BH berkembang menjadi suatu sistem yang tidak hanya berfokus pada pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, pengelolaan aset, evaluasi kinerja, dan pertanggungjawaban sosial. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pada PTN-BH dapat dianalisis melalui empat dimensi utama, yaitu akuntabilitas struktural, akuntabilitas berbasis kinerja, akuntabilitas digital, dan akuntabilitas publik.

Dimensi pertama adalah akuntabilitas struktural, yang ditunjukkan melalui pembentukan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang berlapis di lingkungan PTN-BH. Hasibuan dkk. (2025) menemukan bahwa efektivitas pengendalian internal, kualitas audit internal, hubungan auditor dan auditee, serta budaya etika organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajemen keuangan PTN-BH, dengan budaya etika kelembagaan menjadi faktor yang paling dominan. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan adanya kesenjangan antara pengawasan dan tindak lanjut hasil audit, karena masih banyak temuan yang belum ditindaklanjuti secara optimal. Temuan ini diperkuat oleh Azis (2021) yang menjelaskan bahwa transformasi menuju PTN-BH membutuhkan pembangunan arsitektur akuntabilitas yang komprehensif melalui pengembangan kebijakan

akuntansi, sistem penganggaran, evaluasi kinerja, dan pengelolaan dana abadi berbasis prinsip TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness*). Selain itu, Tamara dan Supriyanto (2022) menegaskan bahwa akuntabilitas formal juga diwujudkan melalui kewajiban pelaporan berkala kepada KPA, Majelis Wali Amanat, Menteri Keuangan, dan kementerian terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban vertikal institusi.

Dimensi kedua adalah akuntabilitas berbasis kinerja, yaitu kemampuan perguruan tinggi dalam mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja secara objektif. Nurchayati dkk. (2025) menunjukkan bahwa analisis rasio keuangan mampu menggambarkan efektivitas, efisiensi, likuiditas, dan solvabilitas PTN-BH sebelum dan sesudah transformasi kelembagaan. Meskipun terjadi peningkatan pendapatan dan efisiensi belanja setelah menjadi PTN-BH, peningkatan kewajiban dan penurunan likuiditas menunjukkan bahwa otonomi keuangan juga diikuti oleh peningkatan risiko yang harus dikelola secara akuntabel. Temuan serupa ditunjukkan oleh Setyorini dkk. (2022) yang menemukan bahwa UNY telah memperoleh predikat akuntabilitas yang baik melalui capaian SAKIP kategori A dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), meskipun masih terdapat kelemahan dalam tindak lanjut temuan BPK dan audit aset yang belum dilakukan secara khusus. Sementara itu, Endawansa dan Juwono (2024) menemukan bahwa penerapan GUG di Universitas Indonesia belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kelemahan pada aspek integritas keuangan, evaluasi kinerja pegawai, dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan instrumen evaluasi kinerja belum tentu menjamin tercapainya akuntabilitas yang konsisten apabila tidak disertai tindak lanjut yang berkelanjutan.

Dimensi ketiga adalah akuntabilitas digital, yang semakin penting seiring berkembangnya transformasi tata kelola berbasis teknologi informasi. Wicaksono dan Idris (2025) menemukan bahwa pengelolaan keuangan PTN-BH telah didukung oleh penggunaan aplikasi keuangan terintegrasi, *chart of account* yang terstandarisasi, dan penyusunan RKAT yang melibatkan berbagai unit kerja. Temuan ini diperkuat oleh Widayat dkk. (2024) yang menjelaskan bahwa sistem MyUNNES-Keuangan dikembangkan untuk mengintegrasikan data perencanaan, aset, pengadaan, dan akuntansi dalam satu platform digital. Namun, efektivitas pemanfaatannya masih berada pada kategori sedang sehingga akuntabilitas digital belum sepenuhnya optimal. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa kesalahan dalam pelaporan aset berpotensi menyebabkan laporan keuangan menjadi *disclaimer* dan dapat mengancam keberlanjutan status PTN-BH. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas di era digital tidak lagi hanya bergantung pada laporan manual, tetapi juga pada kualitas sistem informasi yang digunakan.

Dimensi terakhir adalah akuntabilitas publik, yaitu pertanggungjawaban perguruan tinggi kepada masyarakat atas seluruh kebijakan dan dampak yang ditimbulkannya. Yanuar dkk. (2024) mengungkap adanya paradoks dalam kebijakan PTN-BH, karena otonomi keuangan yang semakin luas justru berpotensi melemahkan pengawasan publik. Kenaikan UKT dan komersialisasi pendidikan menjadi indikator bahwa mekanisme pertanggungjawaban kepada masyarakat

belum berjalan secara optimal. Temuan tersebut sejalan dengan Rosyida dkk. (2025) yang menegaskan bahwa otonomi PTN-BH harus diimbangi dengan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran, mutu pendidikan, hasil penelitian, dan efektivitas kerja sama yang dilakukan. Selain itu, Islami dkk. (2025) menunjukkan bahwa upaya mewujudkan kemandirian finansial harus disertai dengan tata kelola berbasis risiko agar penggunaan sumber pendanaan non-negara tetap dapat dipertanggungjawabkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, akuntabilitas publik menjadi elemen penting untuk menjaga legitimasi institusi dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap PTN-BH.

Secara keseluruhan, sintesis literatur menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas pada PTN-BH telah berkembang dari sekadar kewajiban administratif menuju sistem tata kelola yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kinerja. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya tindak lanjut hasil audit, ketidakseimbangan antara otonomi dan pengawasan publik, serta belum optimalnya integrasi sistem digital di beberapa perguruan tinggi. Oleh karena itu, dalam perspektif *Good University Governance*, akuntabilitas tidak cukup dipahami sebagai kewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban, tetapi harus diwujudkan sebagai mekanisme yang mampu menjamin bahwa seluruh sumber daya, kebijakan, dan hasil kinerja PTN-BH dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, terukur, dan berkelanjutan kepada seluruh pemangku kepentingan.

SIMPULAN

Implementasi transparansi dan akuntabilitas keuangan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) merupakan fondasi utama dalam mewujudkan *Good University Governance* (GUG) yang efektif dan berkelanjutan. Transparansi telah berkembang dari sekadar kewajiban administratif menjadi keterbukaan informasi yang mencakup proses pengambilan kebijakan, pengelolaan keuangan dan aset, digitalisasi sistem, serta penguatan budaya organisasi yang berorientasi pada keterbukaan. Sementara itu, akuntabilitas diwujudkan melalui mekanisme pengawasan internal dan eksternal, sistem pelaporan berjenjang, pengukuran kinerja berbasis indikator keuangan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pertanggungjawaban institusi. Meskipun demikian, implementasi kedua prinsip tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum optimalnya tindak lanjut hasil audit, ketidakkonsistenan keterbukaan informasi, kesenjangan kapasitas antarperguruan tinggi, potensi komersialisasi pendidikan, serta belum seimbangannya hubungan antara otonomi dan pengawasan publik. Oleh karena itu, penguatan transparansi dan akuntabilitas perlu dilakukan secara terintegrasi melalui perbaikan tata kelola, pengembangan sistem digital, penguatan budaya etika organisasi, dan peningkatan partisipasi pemangku kepentingan agar PTN-BH mampu menjalankan otonomi secara bertanggung jawab serta membangun tata kelola keuangan yang kredibel, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Penguatan transparansi dan akuntabilitas keuangan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) perlu diarahkan pada pengembangan tata kelola yang lebih terbuka, terintegrasi, dan berorientasi pada

kepentingan publik. PTN-BH disarankan untuk meningkatkan keterbukaan informasi terkait pengelolaan keuangan, penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT), pemanfaatan aset, serta penggunaan sumber pendanaan non-APBN melalui sistem informasi digital yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan internal, tindak lanjut hasil audit, dan evaluasi kinerja secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan bahwa otonomi yang dimiliki tetap berjalan seiring dengan prinsip pertanggungjawaban publik. Perguruan tinggi juga perlu memperkuat budaya etika organisasi, meningkatkan partisipasi sivitas akademika dalam proses pengambilan keputusan, serta mengoptimalkan diversifikasi sumber pendanaan agar tidak menimbulkan kecenderungan komersialisasi pendidikan. Bagi penelitian selanjutnya, diperlukan kajian empiris yang membandingkan implementasi transparansi dan akuntabilitas antar-PTN-BH dengan karakteristik yang berbeda guna menghasilkan model *Good University Governance* yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan sesuai dengan konteks perguruan tinggi di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Ariani, P. S., & Sulindawati, N. L. G. E. (2025). Analisis Praktik Public Governance Development Dalam Penyusunan Anggaran Dan Pelaporan Realisasi Anggaran Desa Di Desa Ambengan. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 16(02), 319-332.
- Artini, N. K. Y., Diatmika, I. P. G., & Purnamawati, I. G. A. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Ketepatan Waktu Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dengan Partisipasi Komite Sebagai Variabel Moderasi. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha)*, 15(03), 548-558.
- Asih, G., & Adiputra, I. M. P. (2022). Analisis penerapan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) versi 2.0. 3 dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa pada masa pandemi Covid-19 (Studi pada Desa Kalibukbuk, Kec. Buleleng, Bali). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha)*, 13(01), 12-23.
- Azis, M. F. (2021). *Transformasi Universitas Brawijaya dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum menuju Badan Hukum: Strategi pada masa transisi dalam aspek keuangan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.
- Endawansa, A., & Juwono, V. (2024). Analysis of the principles of good university governance at the University of Indonesia as a State University with Legal Entity (PTN-BH) in 2014-2019. *Jurnal Borneo Administrator*, 20(1), 57-70.
- Hasibuan, R. P. S., Nasution, F. N., Bukit, R. B., & Sibarani, R. (2025). What drives financial management in Indonesian state universities with legal entity status (PTN BH)? Evidence from internal oversight units. *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, 23(11), 364-386.
- Irianti, D. I., Purnamawati, I. G. A., & Dewi, G. A. R. S. (2026). Digitalization of public accountability: Integrating digital literacy into public sector audit and accounting practice. *Research Horizon*, 6(2), 1051-1062.

- Islami, P., Wahyuni, E. T., & Sari, P. Y. (2025). Financial sustainability of state universities with legal entity (PTN-BH): Challenges and strategies for financial independence. *JAFSA*, 12(2), 122-136.
- Nurchayati, Pratiwi, S., Hidayat, T., Rahmawati, D. Y., & Kiswanto. (2025). Analisis laporan keuangan Universitas Negeri Semarang sebelum dan sesudah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 11(2), 95-100.
- Purnamawati, I. G. A., & Rahayu, S. (2025). Financial Management Accountability of Subak Local Institutions in A Balanced Values of Hinduism and Multi-Strategic Role. *International Journal of Organizational Behavior and Policy*, 4(1), 41-52.
- Purnamawati, I. G. A., & Saerce, E. H. (2024). Collaborative governance in strengthening dimensions of competitive advantage of sustainable ecotourism villages. *International Review of Management and Marketing*, 14(4), 180.
- Rosyida, F. A., Sa'diyah, Z., Suti'ah, & Aziz, A. (2025). Analisis tantangan dan peluang kebijakan PTN-BH: Studi kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia. *Dirasah*, 8(1), 147-160.
- Setyorini, D., Mustikawati, R. I., & Waluyo, I. (2022). Kesiapan pengelolaan aset UNY dalam rangka optimalisasi income generating untuk mendukung PTNBH UNY. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 20(2), 198-208.
- Sudartini, P. V., & Werastuti, D. N. S. (2025). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan Di Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 16(02), 263-273.
- Sujatnika, I. N. J., & Sulindawati, N. L. G. E. (2022). Pengaruh Sistem Pelaporan, Kompetensi Perangkat Desa, Kepemimpinan Kepala Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(02), 378-388.
- Suwardhiti, N. P. E., Diatmika, I P. G., & Yuniarta, G. A. (2024). Pengaruh Pengelolaan dan Aksesibilitas Laporan BOS terhadap Persepsi Komite Sekolah: Akuntabilitas Keuangan sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 14 (1), 21-32.
- Tamara, N. E., & Supriyanto, A. (2022). Penerapan standar akuntansi keuangan untuk pengelolaan keuangan di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 13(2), 17-25.
- Wicaksono, A., & Idris. (2025). Financial and asset management of higher education (A comparative study of universities with legal entities-PTNBH). *Assets: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 9(1), 1-7.
- Widayat, W., Mundzir, A., & Budiman, K. (2024). Efektivitas pemanfaatan MyUNNES-Kepemimpinan Kepala Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(11), 70-83. ISSN: 2810-0581 (online).
- Wulandari, K. R., & Dewi, P. E. D. M. (2024). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Lembaga Pengelola Air Minum Tirta Manik Sari Desa Bebetin

Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 15(02), 282-291.

Yanuar, D., Pratama Putra, F. H., Kresna, H. G., & Taqie, N. (2024). Dinamika kebijakan kampus PTN-BH dari masa ke masa melalui tinjauan historis. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 49-52.